

**PELAKSANAAN PINJAM PAKAI DI NAGARI
TARUNG -TARUNG KECAMATAN RAO
MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Perbandingan Antara Suku Minangkabau Dengan Suku Mandailing)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh :

ZULHENDRI
NIM 10223020066

**JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

A B S T R A K

Skripsi ini berjudul: " **PELAKSANAAN *PINJAM PAKAI* DI NAGARI TARUNG-TARUNG KECAMATAN RAO MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan Antara Suku Minangkabau Dengan Suku Mandailing)**

dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis tentang adanya praktek transaksi pinjam pakai yang dilakukan oleh dua komunitas (suku minangkabau dan suku mandahiling) masyarakat Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan *Pinjam Pakai* di Nagari Tarung-Tarung, dengan membandingkan pelaksanaan *pinjam pakai* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Minangkabau dengan Suku *Mandailing*, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan praktek *pinjam pakai* tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research). Adapun metode yang digunakan dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengolah data dalam penulisan penelitian ini adalah, dengan menentukan lokasi penelitian, subyek dan abyek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode penulisan, dan metode analisa data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Pinjam Pakai*, bagaimana perbandingan pelaksanaan *Pinjam Pakai* masyarakat Suku *Mandailing* dan Minangkabau, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persoalan tersebut.

Dari penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa praktek *Pinjam Pakai* yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Tarung-tarung baik Suku Minangkabau maupun Suku *Mandailing* mengandung unsur riba. yang dilarang agama Islam. Akan tetapi sebagian kecil dari masyarakat Suku *Mandailing* dalam praktek- nya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	
.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
15	
A. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Nagari Tarung- Tarung	
.....	15
B. Geografis dan Demografis	
.....	16
1. Pendidikan	
.....	17
2. Keagamaan	
.....	19
3. Adat Istiadat.....	
.....	20

4. Sosial Ekonomi	21
-------------------------	----

BAB III :TINJAUAN TEORITIS TENTANG GADAI (RAHN) DAN PINJAM MEMINJAM (QARAT) DALAM ISLAM.....	23
--	----

A. Pengertian Gadai (Rahn)	23
1. Hukum dan Dasar Hukum Gadai (Rahn)	25
2. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn).....	27
3. Manfaat Barang Agunan.....	31
4. Bertambahnya Barang Agunan.....	35
B. <i>Qard</i> (Pinjam meminjam).....	36
1. Hukum dan Dasar Hukum <i>Qard</i>	36
2. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	39
3. Larangan dalam Utang Piutang	39
4. Anjuran Segera Membayar Utang	42

BAB IV : PELAKSANAAN PINJAM PAKAI DI NAGARI TARUNG- TARUNG	44
A. Pelaksanaan Pinjam Pakai Di Nagari Tarung-Tarung.....	44

B. Perbandingan	58
C. Analisa	59
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Muamalah/ Iqtisyadiyah (Ekonomi Islam) merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Kitab-kitab Islam tentang muamalah sangat banyak dan berlimpah dan juga sangat mudah didapat. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) keislaman mereka. Seluruh kitab fiqh membahas fiqh ekonomi. Bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas muamalah atau ekonomi Islam, seperti kitab Al-Amwal oleh Abu Ubaid, Kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf, Al-Iktisab fi Rizqi al-Mustathab oleh Hasan Asy-Syaibani, Al-Hisbah fi al-Islam oleh Ibnu Taymiyah, dan banyak lagi yang tersebar dibuku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan sebagainya.

Namun dalam waktu yang panjang, seiring dengan perkembangan zaman materi muamalah menurut tuntunan ajaran Islam cenderung di abaikan kaum muslimin, padahal ajaran muamalah adalah bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). Secara jelas dalam agama Islam ummatnya diperintahkan untuk memasuki Islam secara kaffah (menyeluruh).

Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT:



“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al- Baqarah 208).

Akibat dari ketidak pahaman umat Islam tentang permasalahan ini, banyak praktek muamalah yang dilakukan umat Islam bertentangan dengan yang telah digariskan oleh Islam.

Di antara permasalahan yang dibahas dalam mu`amalah adalah permasalahan pinjam meminjam (Ariyah). Ari yah dalam Islam sangat di anjurkan, bahkan menurut Ibnu Taimiyyah meminjamkan sesuatu kepada orang lain adalah wajib, dengan catatan sipemilik tidak memerlukannya¹ Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan defenisi Ariyah. Mazhab Maliki dan Imam Syarakhsi dari mazhab Hanafi memberikan defenisi bahwa pinjam meminjam adalah kebebasan memanfaatkan sesuatu tanpa ganti rugi.

¹. Sale al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta : Gema Lusani Press, Cet 1 2005) h 494.

Sementara Mazhab Syafi'i dan Hanbali memberikan definisi bahwa pinjam meminjam adalah izin untuk memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi.

Perbedaan definisi di atas membawa konsekuensi hukum yang berbeda, misalnya seseorang yang meminjam sepeda. Berdasarkan definisi yang pertama, ia boleh meminjamkan sepeda yang dipinjamnya tersebut kepada orang lain (pihak ketiga), karena dari definisi di atas ada ungkapan "kebebasan untuk memanfaatkan". Sementara menurut definisi yang kedua orang yang meminjam sepeda tidak boleh meminjamkan sepeda tersebut kepada pihak lain tanpa seizin yang punya sepeda².

Walaupun ada perbedaan pendapat dalam memberikan definisi *`Ariyah*, akan tetapi ada satu kesepakatan di antara mereka bahwa pinjam meminjam adalah pemanfaatan barang orang lain tanpa ada ganti rugi. Dari sini dapat dipahami bahwa pinjam meminjam bukanlah termasuk akad *Mu`awadhat* (transaksi bisnis), akan tetapi pinjam meminjam termasuk bentuk *Tabaru`at* (amal kebajikan) yang mempunyai nilai-nilai Ta`awun (tolong menolong) di antara sesama³.

Kata *Mu`awadhat* adalah bentuk mashdar dari kata *`Awadha* yang dalam bahasa arab berarti *Badala* (bentuk musyarakah dengan makna tukar menukar)⁴. Dengan demikian akad *mu`awadhat* adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk mengungkapkan bentuk kepemilikan yang berdiri di atas dasar terciptanya hak dan kewajiban yang saling bertukar antara dua orang

². Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensikopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.121

³. Siddiq M Amin Dhahir, *al- Garar Fi al- 'Uqud wa Atsaruh Fi al- Tathbiqoh al- Mu'ashir* (terj), (Jakarta : Visi Insani, 2005), h. 195

⁴. Ibnul Manzbur, *Lisan al-Arab*, (Cairo : Dar el-Ma'arif, th) h. 3180.

yang berakad⁵. Transaksi *Mu`awadhat Maliyah* sangat banyak macamnya dalam fikih Islam, seperti segala bentuk jual beli, *Ijarah* (Sewa Menyewa), *Syirkah*, *Rahn* (Gadai) dan lain sebagainya yang didalamnya disyaratkan adanya ganti bagi yang diserahkan⁶. Akad-akad seperti ini dinamakan dengan akad *Mu`awadhat* karena tujuan dari dilaksanakannya akad ini adalah mendapatkan ganti (*`Awdh/Iwadh*). Akad *Mu`awadhat* berbeda dengan akad *Tabaru`at* yang dilakukan atas dasar tolong menolong dan penyerahan hanya dilakukan oleh salah satu pihak tanpa mendapatkan ganti.

Rahn secara kebahasaan berarti tetap, kekal dan jaminan. Dalam bahasa Arab dikatakan *Maa Rahin* yang berarti air yang menetap.⁷ *Rahn* dalam istilah hukum positif Indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam *Rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.⁸

Ada beberapa defenisi *Rahn* yang dikemukakan oleh ulama Fiqih. Ulama Mazhab Hanafi mendefenisikannya dengan “Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

Ulama Mazhab Maliki mendefenisikannya dengan “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”.

⁵. ‘Athiyyah Abdullah Ramadhan, *Mausu’ah al-Qawai’d al-Fiqhiyyah*, (Iskandariyah : Dar el-Aiman, 2007), h. 134.

⁶. Siddiq M Amin Dhahiri, *op.cit.*, h. 195.

⁷ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, (terj), (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 414.

⁸ Dari sisi ini, *Rahn* termasuk Akad *Tabaru`at* yang berorientasikan pahala dan tolong menolong, bukan akad *mu`awadat* yang berorientasi untung dan laba.

Menurut mereka, yang dijadikan agunan tersebut bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan agunan tersebut, menurut mereka tidak harus diserahkan secara actual, tetapi juga bisa penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.

Sedangkan Ulama Mazhab Syafi'I mendefinisikan *Rahn* sebagai akad yang menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya.⁹ Defenisi yang sama dengan defenisi yang dikemukakan oleh Ulama Mazhab Syafi'I juga dikemukakan oleh Ulama Mazhab Hanbali. Defenisi yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan agunan hutang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki di atas, sekalipun sebenarnya manfaat tersebut menurut mereka (Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali) termasuk ke dalam pengertian harta. Melakukan transaksi hutang-piutang dengan jaminan disebut akad *Rahn*.¹⁰

Rahn ditangan *al-Murtahin* (pemberi hutang, kreditor) hanya berfungsi sebagai jaminan hutang *al-Rahin* (orang yang berhutang, debitor). Barang jaminan itu baru bisa dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, uang tidak bisa dilunasi oleh debitor. Oleh sebab itu, hak kreditor

⁹ Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* Juz 12, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, th), h. 300.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1480.

hanya terkait dengan barang jaminan, apabila debitor tidak mampu melunasi hutangnya.¹¹

Berdasarkan hal di atas, ada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang didalamnya disyaratkan ada manfaat yang akan diterima oleh orang yang meminjamkan, maka itu adalah riba¹².

Nagari Tarung-Tarung merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Secara geografis Kecamatan Rao termasuk atau terletak dipinggiran tanah ulayat Minangkabau. Masyarakatnya termasuk masyarakat yang heterogen.

Nagari Tarung-Tarung ini ditempati oleh dua komunitas yang besar yaitu Suku Minangkabau dan Suku *Mandailing*. Masyarakat dua suku ini merupakan masyarakat yang dari dulu dikenal sebagai masyarakat yang teguh memegang ajaran agama Islam.

Di Nagari Tarung-Tarung praktek muamalah juga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Praktek pinjam meminjam juga luas dikenal ditengah masyarakat Nagari Tarung-Tarung. Praktek pinjam meminjam di Nagari Tarung-Tarung memiliki sedikit kekhasan bila dibandingkan dengan tempat lain. di nagari ini dikenal istilah *pinjam pakai*.

Di kalangan masyarakat Nagari Tarung-Tarung, praktek *pinjam pakai* dilaksanakan apabila seseorang hendak meminjam sejumlah uang kepada orang lain. Konsekuensi dari peminjaman tersebut ia harus merelakan tanahnya untuk digarap oleh orang tempat ia meminjam uang tersebut. Dari

¹¹ *Ibid.*

¹². 'Athiyyah Abdullah Ramadhan, *op.cit.*, h. 300.

keterangan di atas menjelaskan bahwa, *pinjam pakai* di Nagari Tarung-Tarung terfokus kepada peminjaman uang dan tanah.

Selama tahun 2008 (terhitung januari sampai juni), tercatat tidak kurang terjadi lima praktek *pinjam pakai* di Nagari Tarung-Tarung. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Eri¹³ di awal januari, Bapak Eri mengalami kesulitan keuangan dalam keluarganya. Untuk keperluan itu ia meminjam sejumlah uang kepada Ibu Epi. Konsekuensi dari peminjaman tersebut Bapak Eri harus merelakan tanahnya digarap oleh Ibu Epi, dan sampai sekarang pun, karena hutang tersebut masih belum bisa dilunasi oleh Bapak Eri, tanah tersebut masih digarap oleh Ibu Epi¹⁴.

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik untuk dikaji lebih mendalam apakah pemakaian tanah oleh pihak yang meminjamkan termasuk manfaat seperti yang disebutkan di atas dan bagaimana hukum *pinjam pakai* itu sendiri menurut hukum Islam. Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :

” PELAKSANAAN *PINJAM PAKAI* DINAGARI TARUNG-TARUNG KECAMATAN RAO MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan Antara Suku Minangkabau Dengan Suku *Mandailing*) ” .

¹³. Eri (Masyarakat Nagari Tarung-Tarung), *Wawancara*, Nagari Tarung-Tarung 28 Oktober 2008

¹⁴. Epi (Masyarakat Nagari Tarung-tarung), *Wawancara*, Nagari Tarung-tarung 29 Oktober 2008.

B. Batasan Masalah

Banyak aspek yang akan diteliti dalam permasalahan *pinjam pakai* ini. Akan tetapi, untuk menghasilkan tingkat validitas yang tinggi serta mengingat keterbatasan waktu dan supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini difokuskan kepada:

1. Bagaimana pelaksanaan *pinjam pakai* uang dan tanah di Nagari Tarung-Tarung
2. Apa perbedaan antara *pinjam pakai* Suku Minangkabau dengan Suku *Mandailing*
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan *pinjam pakai* di Nagari Tarung-Tarung.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *Pinjam Pakai* uang dan tanah di Nagari Tarung-Tarung,
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan praktek *pinjam pakai* antara Suku Minangkabau dengan Suku *Mandailing*,
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan *pinjam pakai* tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah :
 - a. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana pelaksanaan *Pinjam Pakai* di Nagari Tarung-Tarung,
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan pelaksanaan *pinjam pakai* antara Suku Minangkabau dengan Suku *Mandailing*,
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Pinjam Pakai* di Nagari Tarung-Tarung.
2. Adapun kegunaan dari penelitian adalah :
 - a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dari Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau,
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang hukum Islam dipergustakaan UIN SUSKA Riau,
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengolah data dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan mengambil lokasi Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao

Kabupaten Pasaman. Lokasi ini dipilih dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. *Pinjam Pakai* merupakan salah satu tradisi yang masih dijalankan di Nagari Tarung-Tarung,
- b. Penduduk Desa ini merupakan masyarakat yang dikenal teguh memegang agama dan adat istiadat,
- c. Penulis berdomisili di nagari ini, sehingga memudahkan bagi penulis untuk berkomunikasi dan mendapat data dan informasi untuk keperluan penelitian ini.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Tarung-Tarung. Sedangkan obyek penelitian ini adalah tradisi pelaksanaan *Pinjam Pakai* di daerah tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah, masyarakat Nagari Tarung-Tarung. Karena jumlah populasi dalam penelitian tidak diketahui, maka subyek penelitian ini di ambil sebahagian kecil saja, sebanyak 100 orang untuk dijadikan sampel. Dengan rician 50 orang dari suku Minangkabau dan 50 orang dari suku *Mandailing*. Sampel ini akan ditarik dengan menggunakan teknik *Random Sampling*.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer diperoleh dari responden, yaitu dengan memberikan angket dan mewawancarai masyarakat umum, yang terlibat dalam tradisi *pinjam pakai* ataupun yang tidak terlibat secara langsung, dan pemuka masyarakat yang tahu dengan asal usul dan pelaksanaan tradisi *pinjam pakai*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari literature-literatur atau kitab-kitab yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang di ajukan kepada responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti,
- b. Wawancara, penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan informan penelitian, yaitu masyarakat yang pernah melakukan tradisi *pinjam pakai* dan masyarakat umum, pemuka masyarakat dan pemuka agama. Wawancara lebih difokuskan pada tata cara pelaksanaan *pinjam pakai* sehingga didapatkan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan *pinjam pakai* itu sendiri serta difokuskan pada penajaman dan perluasan pertanyaan yang disebarkan melalui

angket, sehingga data yang diperoleh melalui angket dihubungkan atau diperkuat oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara,

- c. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap pelaksanaan *Pinjam Pakai* di Nagari Tarung-Tarung. Karena penulis hidup ditengah masyarakat ini, maka pengalaman penulis terhadap pelaksanaan *Pinjam Pakai* juga bisa dijadikan data yang didapat melalui observasi,
- d. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya,
- b. Induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, di analisa kemudian di ambil kesimpulan secara umum,
- c. Deduktif, menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian di analisa dan di ambil kesimpulan secara umum,
- d. Komparatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari suku Minangkabau dengan data yang diperoleh dari suku *Mandailing*.

7. Metode Analisa Data Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan. Metode analisa ini digunakan terutama terhadap data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan survey.
- b. Kuantitatif, yaitu analisa data terhadap data-data dari angket. Data-data yang terkumpul setelah di edit dan dikode, ditabulasi dan diberi persentase pada table, di interpretasikan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dari data hasil penelitian.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Profil Lokasi Penelitian, Yaitu Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, meliputi kondisi geografis dan demografis, Pendidikan, keagamaan, sosial budaya, adat istiadat dan perekonomian.
- BAB III** : Tinjauan Teoritis Tentang Gadai (*Rahn*) dan Pinjam Meminjam (*Qard*) dalam Islam, meliputi Pengertian Gadai (*Rahn*), Hukum

dan Dasar Hukum *Rahn*, Syarat dan Rukun *Rahn*, Manfaat Barang Agunan, *Qard* Pinjam Meminjam, Hukum dan Dasar dan dasar Hukum Hutang Piutang, Rukun dan Syarat *Qard*, dan anjuran Segera Membayar Utang.

BAB IV : Pelaksanaan *Pinjam Pakai* di Nagari Tarung-Tarung, Meliputi Perbandingan Antara Pelaksanaan *Pinjam Pakai* Masyarakat Suku Minangkabau dengan Masyarakat Suku *Mandailing* dan Analisa.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh Wali Jorong. Wali Nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokrasi. Biasanya yang dipilih jadi Wali Nagari adalah orang yang di anggap paling menguasai semua aspek kehidupan dalam budaya minagkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab persoalan yang dihadapi anak nagari.

Sistem kenagarian telah ada semenjak kemerdekaan. Namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, sistem kenagarian dihilangkan dan jorong digantikan statusnya menjadi desa. Kedudukan Wali Nagari dilepaskan, administrasi pemerintahan dijalankan oleh kepala desa. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkan kembali semangat masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menjalankan sistem pemerintahan nagari. Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001. Istilah nagari beserta keistimewannya kembali digunakan di Sumatera Barat.

Berdasarkan cerita yang diyakini oleh penduduk di Nagari Tarung-Tarung, bahwa penduduk asli Nagari Tarung-Tarung dan sekaligus yang

pertama kali membuka daerah tersebut adalah Datuk Rangkyo Basa beserta rombongannya dari Pariangan Padang Panjang ke arah timur untuk mencari daerah baru. Dalam perjalanan tersebut mereka berhenti pada suatu tempat dan disana mereka mulai menebang pohon, kebetulan ada pohon yang mirip dengan toruang (terung). Oleh sebab itu maka dinamakanlah tempat itu dengan *toruang-toruang*, dan sekarang disebut dengan Nagari Tarung-Tarung. Setelah menebang pohon mereka mendirikan rumah sehingga terbentuklah dusun selanjutnya berkembang kepada tingkat yang lebih besar disebut *koto* (kota) hal ini dapat diketahui dengan adanya di Nagari Tarung-Tarung wilayah *koto gadang* (kota besar) dan *koto kacik* (kota kecil).

Setelah Nagari Tarung-tarung terbentuk maka berdatanganlah orang-orang dari luar Nagari Tarung-Tarung dengan tujuan berdagang. Daerah pendatang awalnya masih terbatas dari daerah Tapanuli Selatan (propinsi Sumatera utara). Kedatangan orang *mandailing* dari daerah tapanuli selatan propinsi Sumatera Utara secara besar-besaran ke daerah pasaman pada umumnya, dimulai antara tahun 1950-1953, ketika kabupaten pasaman dipimpin oleh Bupati Basrah Lubis¹.

B. Geografis dan Demografis

Kenagarian Tarung-Tarung merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman bagian utara Sumatera Barat. Kecamatan Rao merupakan daerah perbatasan (marginal area) antara propinsi Sumatera Barat dengan propinsi Sumatera Utara. Dan jarak antara Nagari

¹. Hasan Basri Dt. Rang Kayo Basa (Pmimpin Adat di Nagari Tarung-tarung), *Wawancara*.

Tarung-Tarung dengan perbatasan Sumatera Utara 5 km. Nagari Tarung-Tarung mempunyai luas wilayah 28.833 Ha (94,36 KM²). Jarak antara Nagari Tarung-Tarung dengan ibukota kecamatan 2 km, dengan ibukota kabupaten 49 km dan dengan ibukota propinsi 212 km. Kenagarian Tarung-Tarung berbatasan dengan:

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Talamau
- Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Lubuk Layang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Langsung Kadap
- Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Padang Mentinggi

Berdasarkan pendataan tahun 2008 penduduk Nagari Tarung-Tarung berjumlah 15.028 dengan perbandingan laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK NAGARI TARUNG-TARUNG

Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
6893	45,87%	8.135	54,13%	15.028

Sumber : *Monografi Kenagarian Tarung-tarung*

Dari jumlah penduduk tersebut, Nagari Tarung-Tarung didominasi oleh dua suku, Minangkabau dan *Mandailing* . Namun secara rinci penulis tidak memperoleh data yang pasti persentase antara kedua suku tersebut.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, baik dalam kehidupan perseorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan penduduk

dalam menerima dan menerapkan suatu inovasi atau teknologi baru dan berpengaruh pula dengan persepsi yang mereka kemukakan terhadap sesuatu yang mungkin berbeda dengan keyakinan mereka selama ini.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf hidup serta martabat manusia. Dengan pendidikan berbagai macam kemajuan telah dicapai oleh manusia. Untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas maka diperlukan suatu sarana pendidikan yang baik pula.

Nagari Tarung-Tarung merupakan suatu nagari yang mempunyai sarana pendidikan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan nagari-nagari yang lain yang terdapat di Kecamatan Rao. Adapun sarana-sarana pendidikan yang terdapat di Nagari Tarung-Tarung, dapat dilihat pada table dibawah ini ;

TABEL II
SARANA PENDIDIKAN DI NAGARI TARUNG-TARUNG

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	MDA	13
3.	SD	15
4.	SLTP/MTS	6
5.	SLTA/MA/SMK	4
	SLB/Paket A	1

Sumber : *Data Monografi Kenagarian Tarung-tarung 2008*

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa Nagari Tarung-Tarung telah memiliki sarana pendidikan yang lengkap mulai dari tingkat Taman

Kanak-kanak (TK), sampai dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

2. Keagamaan

Agama adalah hubungan antara makhluk dengan khaliknya, hubungan ini terwujud dengan sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukan dan tercermin pula dalam tingkah laku dan sikap kesehariannya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa agama merupakan pedoman dasar dan pegangan hidup bagi manusia.

Merupakan suatu kenyataan bahwa agama merupakan kesempurnaan eksistensi manusia, sumber vitalitas yang mewujudkan perubahan manusia dan melestarikannya. Kualitas suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas agama yang mendasarinya, seiring dengan itu agama juga diakui sebagai salah satu sumber nilai yang memiliki peranan dan sumbangan cukup besar yang paling tinggi nilainya bagi setiap jenjang kehidupan manusia.

Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan masyarakat ditunjang dengan sarana-sarana ibadah seperti mesjid dan mushalla. Untuk melihat lebih jelas jumlah sarana ibadah di Nagari Tarung-Tarung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III
JUMLAH RUMAH IBADAH DI NAGARI TARUNG-TARUNG

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	24
2.	Mushalla	14

Pada tempat peribadatan tersebut masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, dakwah Islam, wirid ibu-ibu, wirid remaja, pendidikan al-Qur'an, pendidikan anak-anak tentang keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam.

Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan dari lembaga pemerintahan seperti Departemen Agama dan Pemerintahan Daerah TK II serta Pemerintahan TK I Sumatera Barat.

3. Adat Istiadat

Di samping menganut agama Islam, Masyarakat Nagari Tarung-Tarung terikat oleh aturan-aturan adat yang mereka warisi dari pemimpin adat mereka. Adat itu merupakan kebiasaan yang berlaku dalam hidup sehari-hari didalam lingkungan masyarakat mereka yang tidak boleh dilanggar sedikitpun.

Nagari Tarung-Tarung merupakan wilayah Satera Barat, memakai adat Minangkabau yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (Matrilinial). Namun sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Nagari Tarung-Tarung sangat dekat dengan perbatasan Sumatera Utara, dan didukung dengan akses

jalan yang lancar. Maka imigran dari daerah Sumatera Utara (*suku mandailing*) banyak datang ke Nagari Tarung-Tarung. Maka maka sebagian masyarakatnya memakai adat *Batak Mandailing* yang menisbahkan keturunan dari garis bapak (patrilineal).

Kenagarian Tarung-Tarung merupakan salah satu contoh nagari yang dilini pertemuan dua budaya yang berbeda namun tidak menimbulkan konflik. Perbedaan unsur budaya/adat istiadat tersebut di akomodir dengan membuat kesepakatan antara pendukung kedua kebudayaan tersebut. Orang-orang *mandailing* sebagai pendatang tetap boleh mempertahankan identitas budaya/adatnya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nagari Tarung-Tarung, seperti dapat terlihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan.

4. Sosial Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tentunya setiap manusia memerlukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan profesi mereka masing-masing. Masyarakat Nagari Tarung-Tarung mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan mereka. Adapun luas lahan pertanian di Nagari Tarung-Tarung dapat dilihat dalam rincian dibawah ini sebagai berikut:

- Luas baku sawah : 1697 Ha
- Luas luas kebun rakyat : 5245 Ha
- Luas lahan kolam : 151,98 Ha

Dan sebagian lagi masyarakatnya berprofesi seperti buruh, tukang, pedagan, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya.

Kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga biasanya dilakukan oleh seorang ayah atau suami sebagai kepala keluarga, namun di Nagari Tarung-Tarung ini, kadang-kadang sebagian ibu-ibu atau isteri juga ikut membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG GADAI (*RAHN*) DAN PINJAM MEMINJAM (*QARD*) DALAM ISLAM

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Rahn secara kebahasaan berarti tetap, kekal dan jaminan. Dalam bahasa Arab dikatakan *Maa Rahin* yang berarti air yang menetap.¹ *Rahn* dalam istilah hukum positif Indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam *Rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.²

Ada beberapa definisi *Rahn* yang dikemukakan oleh ulama Fiqih. Ulama Mazhab Hanafi mendefenisikannya dengan “Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

Ulama Mazhab Maliki mendefenisikannya dengan “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”. Menurut mereka, yang dijadikan agunan tersebut bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan agunan tersebut, menurut mereka tidak harus diserahkan secara actual, tetapi juga bisa penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.

¹ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, (terj), (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 414.

² Dari sisi ini, *Rahn* termasuk Akad Tabaru'at yang berorientasikan pahala dan tolong menolong, bukan akad mu'awadat yang berorientasi untung dan laba.

Sedangkan Ulama Mazhab Syafi’I mendefenisikan *Rahn* sebagai akad yang menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya.³ Defenisi yang sama dengan defenisi yang dikemukakan oleh Ulama Mazhab Syafi’I juga dikemukakan oleh Ulama Mazhab Hanbali. Defenisi yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan agunan hutang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki di atas, sekalipun sebenarnya manfaat tersebut menurut mereka (Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali) termasuk ke dalam pengertian harta. Melakukan transaksi hutang-piutang dengan jaminan disebut akad *Rahn*.⁴

Rahn ditangan *al-Murtahin* (pemberi hutang, kreditor) hanya berfungsi sebagai jaminan hutang *al-Rahin* (orang yang berhutang, debitor). Barang jaminan itu baru bisa dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, uang tidak bisa dilunasi oleh debitor. Oleh sebab itu, hak kreditor hanya terkait dengan barang jaminan, apabila debitor tidak mampu melunasi hutangnya.⁵

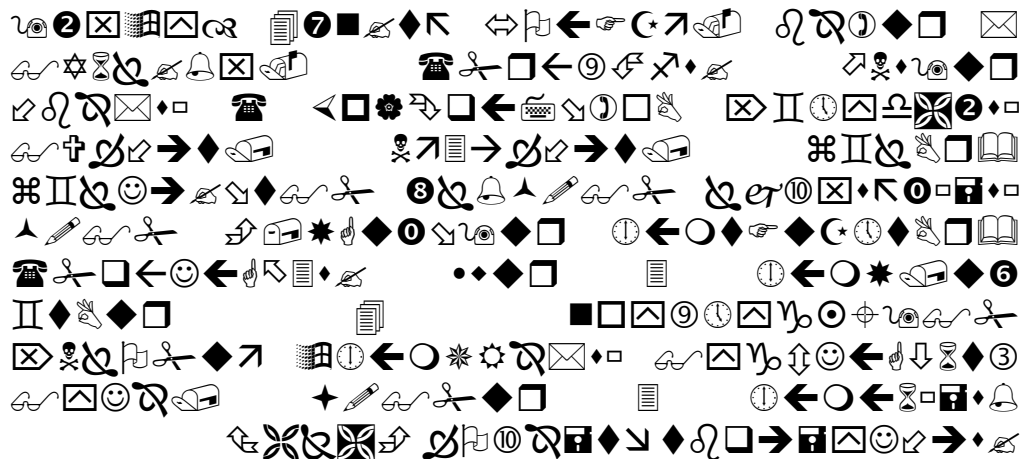
³ Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* Juz 12, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, th), h. 300.

⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1480.

⁵ *Ibid.*

1. Hukum dan Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Ulama Fiqh mengemukakan bahwa akad *Rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Dalam Surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman :



Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *Rahn* bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, apabila barang jaminan itu bisa langsung dipegang (*al-Qabd*) secara hukum oleh kreditor. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai secara langsung oleh kreditor, paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (menjadi agunan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-Qabd*) adalah sertifikat tanah tersebut.

Dalam sebuah riwayat dikatakan sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ. فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا

Artinya : “Dari Anas RA ia berkata “Rasulullah SAW telah menggadaikan

baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau

berhutang gandum dari seorang Yahudi untuk keluarganya”. (HR.

Ahmad, Bukhari, Nasa’I dan Ibnu Majah).⁶

Menurut keterangan dari hadis lain banyaknya gandum yang dihutang oleh Rasulullah dari Yahudi tersebut adalah 30 Sha’ atau sekitar 90 Liter dengan jaminan baju perang.⁷ Menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah saw menggadaikan baju besinya itu adalah kasus *Rahn* pertama di dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah saw bersabda :

⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif, th), h. 416.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1973), h. 309

لا يغلّق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه

Artinya : “Pemilik harta yang di agunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya juga”. (HR. Syafi’i dan al-Daruqutni).⁸

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Rahn* diperbolehkan dalam Islam karena banyak kemaslahatan yang bisa dicapai dengan akad tersebut. Bahkan *Rahn* merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam agama Islam.

2. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

a. Rukun *Rahn*

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama Fiqh dalam menetapkan rukun pelaksanaan akad *Rahn* tersebut. Menurut jumhur Ulama rukun *Rahn* ada empat, yaitu :

1. *Shigah*, yaitu akad Ijab Kabul antara kreditor dan debitor
2. *Akidain*, yaitu orang yang berakad, dalam hal ini adalah kreditor/pemberi utang (al-Murtahin) dan debitor/yang berhutang (al-Rahin)
3. Barang yang dijadikan jaminan atau agunan (al-Marhun)
4. Hutang (al-Marhun Bih)⁹

Sementara ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun *Rahn* itu hanyalah Ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang kepada kreditor) dan Kabul (pernyataan kesediaan memberikan hutang

⁸ Daruqutni, *Sunan Daruqutni Juz 3*, (Beirut : Mu’assasah al-Risalah, 2004), h. 437.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *op.c it.*, h. 1481.

dan menerima barang agunan tersebut oleh kreditor) saja. Di samping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad *Rahn* ini, maka diperlukan al-Qabd (penguasaan barang) oleh kreditor. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan serta hutang tidaklah termasuk rukun, akan tetapi dipandang sebagai syarat.¹⁰

Walaupun ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, akan tetapi kalau ditelaah lebih lanjut, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa ulama sepakat menyatakan bahwa dalam *Rahn* ke empat hal di atas mesti ada dalam akad *Rahn*.

b. Syarat-Syarat *Rahn*

Ulama fiqh menggariskan syarat-syarat dalam akad *Rahn* sesuai dengan rukun-rukun yang ditetapkan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Syarat yang berkaitan dengan *Akid* (*Rahin* dan *Murtahin*), yaitu cakap bertindak hukum. Dalam hal ini Jumhur ulama mengatakan bahwa *Rahin* dan *Murtahin* hendaklah orang yang baligh dan berakal. Sementara Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa *Rahin* dan *Murtahin* tidak mesti baligh, akan tetapi haruslah orang yang berakal. Dengan demikian, menurut ulama Mazhab Hanafi, anak kecil yang sudah mumayyiz boleh dan sah melakukan akad *Rahn* dengan catatan bahwa dia telah mendapat izin dari walinya untuk melakukan akad tersebut.
2. Syarat yang berkaitan dengan *Shighat*. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa dalam akad *Rahn* tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu

¹⁰ *Ibid.*, h. 1480

atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *Rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut di ikuti oleh syarat-syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal dan akadnya sah. Misalnya, debitor/Murtahin mensyaratkan apabila tenggang waktu *Rahn* telah habis dan hutang belum dibayar, maka *Rahn* tersebut diperpanjang satu bulan, atau Kreditor/Murtahin mensyaratkan harta agunan itu bisa ia manfaatkan. Ulama Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali mengatakan apabila syarat tersebut adalah syarat yang mendukung kelancaran akad *Rahn*, maka syarat tersebut diperbolehkan. Akan tetapi apabila syarat tersebut keluar dari tabi'at *Rahn* maka syaratnya batal. Kedua contoh yang dikemukakan di atas merupakan syarat yang bertentangan dengan tabiat akad *Rahn*. Syarat yang mendukung akad *Rahn* dan diperbolehkan contohnya, untuk sahnya akad *Rahn*, kreditor atau Murtahin mensyaratkan akad tersebut disaksikan oleh dua orang saksi.

3. Syarat yang berkaitan dengan hutang (al-Marhun Bih) adalah (a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor, (b) Hutang tersebut bisa dilunasi dengan agunan tersebut, dan (c) Hutang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat yang berkaitan dengan agunan (al-Marhun) adalah (a) agunan tersebut bisa dijual dan nilainya seimbang dengan dengan hutang, (b) agunan tersebut bernilai harta dan bisa dimanfaatkan, karenanya khamar tidak bisa dijadikan agunan karena khamar tidak bernilai harta dan tidak bisa dimanfaatkan didalam Islam, (c) agunan itu jelas dan tertentu, (d)

agunan itu milik sah Murtahin/Debitor, (e) agunan tersebut tidak terkait dengan hak orang lain, (f) agunan tersebut merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat, dan (g) agunan tersebut bisa diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.¹¹

Di samping syarat-syarat di atas, ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa *Rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan Murtahin/Kreditor dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh Murtahin/Debitor. Apabila barang yang digadaikan tersebut berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah tersebut yang diserahkan, akan tetapi cukup menyerahkan surat atau sertifikatnya saja.

Syarat terakhir dari kesempurnaan akad *Rahn* adalah *al-Qabd al-Marhun*, yaitu barang jaminan tersebut dikuasai secara hukum oleh Murtahin.¹² Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283 di atas. Apabila agunan telah dikuasai oleh Kreditor, maka akad *Rahn* bersifat mengikat kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang terkait dengan agunan, apabila hutang tidak bisa dilunasi maka agunan tersebut dapat dijual dan hutang tersebut terbayar. Apabila dalam penjualan

¹¹ *Ibid.*, h. 1481-1482.

¹² *Rahn* Termasuk termasuk akad *Tabarru'* dalm istilah Fiqih Muamalah, sementara dalam akad *Tabarru'* ada kaidah Fiqih yang mengatakan "Akad *Tabarru'* tidak sempurna kecuali dengan penyerahan". Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), h. 179

agunan tersebut terdapat kelebihan, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada Murtahin.¹³

3. Manfaat Barang Agunan

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan al-Daruqutni di atas Rasulullah saw mengatakan :

لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه

Artinya : *“Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab pemiliknya juga”*. (HR. Syafi'I dan al-Daruqutni).

Berdasarkan hadis di atas para ulama Fiqh sepakat bahwa segala biaya untuk pemeliharaan barang agunan tersebut menjadi tanggung jawab Debitor/Murtahin. Di samping itu ulama fiqh juga bersepakat bahwa barang agunan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan manfaat apa-apa karena hal ini bertentangan dengan pesan Rasulullah saw yang melarang umatnya untuk menyia-nyiakan harta. Akan tetapi bolehkah pihak pemegang barang agunan tersebut memanfaatkan barang agunan tersebut? Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan Fuqaha'.

Jumhur ulama fiqh, selain ulama mazhab Hanbali, mengatakan bahwa pihak pemegang barang agunan tidak boleh memanfaatkan barang tersebut

¹³ *Ibid.*

karena barang tersebut bukanlah miliknya secara penuh. Hak pemegang agunan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila debitor tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia berhak untuk menjual atau mengahargai barang tersebut untuk melunasi hutangnya.¹⁴

Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan untuk memanfaatkannya selama barang tersebut berada ditangannya, maka sebagian Ulama Mazhab Hanafi membolehkan hal tersebut, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang tersebut. Ulama Mazhab Hanafi lainnya, serta ulama Mazhab Syafi'I dan Maliki berpendapat, sekalipun pemilik barang tersebut mengizinkan, pemegang agunan tetap tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena apabila barang tersebut dimanfaatkan maka hasil dari pemanfaatan tersebut merupakan Riba yang dilarang oleh Syara'. Bahkan, menurut mereka, ridha dan izin untuk memanfaatkan barang tersebut dalam hal ini cenderung dilakukan dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak mendapatkan pinjaman yang dikehendaki. Di samping itu, dalam permasalahan Riba, izin dan ridha pihak yang berakad tidak berarti membolehkan terlaksananya akad tersebut.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan sebagai agunan itu adalah binatang ternak. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa al-Murtahin boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut apabila mendapatkan izin dari pemiliknya. Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'I berpendapat bahwa al-

¹⁴. Abdul 'Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 1482

Murtahin boleh memanfaatkan hewan tersebut apabila pemiliknya menyia-nyiakannya, karena menyia-nyiakan harta merupakan larangan Rasulullah saw yang harus dihindari.

Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa apabila yang dijadikan itu barang agunan itu adalah hewan ternak, maka pemegang agunan (al-Murtahin) berhak mengambil susunya dan memanfaatkan hewan tersebut sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk memelihara hewan tersebut.¹⁵ Hal ini sejalan dengan Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا
وعلى الذي يركب ويشرب نفقته

Artinya: “Hewan yang dijadikan sebagai agunan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Dan susu yang dikeluarkan dari kambing yang dijadikan agunan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan di ambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya” (HR. al-Bukhari, Tirmidzi dan Abu Dawud).¹⁶

Dalam hadis lain yang juga diterima melalui Abu Hurairah Rasulullah saw mengatakan :

اذ ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها فان استفضل من
اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا

¹⁵. *ibid*

¹⁶ Tirmidzi, Abi Isa Muhammad ibn Isa al-, *Jami` Kabir Sunan Tirmidzi Juz 2*, (Beirut : Dar al-Gharbi al-Islami, 1998), h. 533

Artinya: “Jika agunan itu seekor kambing, orang yang memegang agunan boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk kambing tersebut. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihannya adalah Riba” (HR. **Ahmad ibn Hanbal**).

Berdasarkan hadis di atas, maka Ulama Mazhab Hanbali juga menggariskan bahwa apabila barang agunan tersebut merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya pemeliharaan, maka *al-Murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang tersebut.

Di samping perbedaan pendapat di atas. Para fuqaha juga berbeda pendapat dalam memandang pemanfaatan barang agunan oleh *Rahin* (Debitor) atau pemilik barang agunan tersebut. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali mengatakan bahwa *Rahin* boleh memanfaatkan barang tersebut apabila mendapatkan izin dari *al-Murtahin*. Mereka berprinsip bahwa segala resiko dari barang agunan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkan. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak ingin memanfaatkan, haruslah mendapatkan izin dari pihak lain. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.

Sementara para Fuqaha' dari Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *Rahin* tidak perlu meminta izin *Murtahin* kalau ingin memanfaatkan barang agunan, karena pada hakikatnya barang tersebut adalah miliknya dan seseorang tidak boleh dihalang-halangi untuk mempergunakan apa yang ia

miliki. Perlu digarisbawahi bahwa pemanfaatan tersebut tidak boleh merusak barang itu baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan, maka *Rahin* wajib bertanggung untuk mengganti atau memperbaikinya. Hal ini sejalan dengan hadis yang dikemukakan di atas.

Bertolak belakang dari pendapat-pendapat di atas, ulama Mazhab Maliki mengemukakan pendapat yang berbeda dan lebih tegas. Menurut mereka *Rahin* tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, baik atas izin *Murtahin* maupun tidak. Hal itu dikarenakan barang tersebut berstatus sebagai barang jaminan hutang, tidak lagi berstatus sebagai hak penuh dari *Rahin*.

Dalam menyikapi perbedaan pendapat di atas, Fatih al-Durani mengemukakan bahwa perbedaan pendapat itu muncul karena kehati-hatian para ulama untuk menjaga agar *Rahin* dan *Murtahin* tidak terjebak ke dalam Riba.¹⁷

4. Bertambahnya Barang Agunan

Barang yang diagunkan bisa saja bertambah selama ditangan *Murtahin*. Pertambahan itu bisa berbentuk tambahan yang bisa dipisahkan dan ada berbentuk tambahan yang tidak bisa dipisahkan.

5. Tambahan yang terpisah, seperti buah, telur dan anak yang lahir setelah induknya digadaikan, tidak termasuk barang agunan, tetapi tetap menjadi kepunyaan *Rahin*. Maka jika barang agunan tersebut dijual oleh *Murtahin*, tambahannya itu tidak boleh dijual dan dikembalikan kepada *Rahin*

¹⁷. Abdul ‘Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 1483

6. Tambahan yang tidak dapat dipisahkan, seperti tambahan gemuk, tambahan besar, semuanya itu termasuk barang agunan.¹⁸

B. *Qard* (Pinjam Meminjam)

Al-Qardh secara kebahasaan berarti *al-Qath`u* (memotong), dinamakan demikian karena pemberi hutang (*Muqridh*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada orang yang berhutang.

Adapun defenisinya secara syara' adalah harta yang diberikan oleh *Muqridh* kepada *Muqtaridh* yang mengambil manfaatnya lalu mengembalikan gantinya ketika ia mampu.¹⁹

Mengembalikan gantinya dalam defenisi di atas bermakna bahwa gantinya tersebut harus sama bentuk dan jumlahnya. Seperti hutang Rp 1.000, mesti diganti dengan uang Rp 1.000,. Atau utang beras mesti diganti dengan beras.²⁰

Al-Qard berbeda dengan '*Ariyah* yang dalam Bahasa Indonesia juga diartikan dengan pinjam meminjam. '*Ariyah* dilakukan terhadap benda yang tetap atau kekal zatnya, seperti meminjam pena, meminjam buku dan lain sebagainya. Sementara dalam *Qard* yang dipinjam tidak kekal zatnya, dengan

¹⁸. *ibid*

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 3*, (Qairo : Fath l'lam al-Arabi, th), h. 127.

²⁰ Moh. Rifa'i. *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : Toha Putra, 1978), h. 414.

kata lain yang dikembalikan bukan zat yang dipinjam, akan tetapi nilai dari benda tersebut, seperti pinjam meminjam mata uang dan lain sebagainya.

1. Hukum dan dasar hukum *Qardh*

Ijma' ulama mengatakan bahwa *Qardh* termasuk perbuatan yang dibolehkan oleh syara'.²¹ Sementara memberi hutang bagi *Muqridh* (orang yang memberikan hutang) termasuk perbuatan yang disunatkan di dalam Islam yang bisa mendekatkan hamba kepada Allah SWT.²² Dalam salah satu hadisnya Rasulullah saw bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Tiada seorang Muslim yang memberikan hutang kepada seorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi)²³

Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan :

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz 4*, (Riyadh : Dar Alam Kutub, th), h. 212. Khatib Syarbini, *al-Mughni al-Muhtaj Juz 2*, (Beirut : Dar el-Ma'rifah, 1997), h. 117.

²² Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

²³ Targhib wa Tarhib 2, h. 41

الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ. وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا
مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: “Pada malam Isra’ saya melihat pintu sorga yang telah ditentukan.
Bagi sedekah diberi pahala sepuluh sementara bagi hutang sebanyak
delapan belas pahala. Lalu saya bertanya “Wahai Jibril, kenapa
hutang piutang lebih afdhal daripada sedekah? Jibril menjawab :
“karena peminta-minta (dalam masalah sedekah) meminta sesuatu
sementara ia masih memiliki sesuatu, sementara orang yang
berhutang tidak akan berhutang kecuali dia memang betul-betul
butuh”.²⁴

Dalam hadis lain Rasulullah saw mengatakan :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Barang siapa yang meringankan satu beban dari seorang muslim di
dunia ini, maka Allah SWT akan meringankan salah satu dari
kesulitan-kesulitan hari kiamat darinya. Orang yang memberikan
kelapangan bagi satu kesempatan maka Allah akan memberikan
kelapangan didunia dan akhirat, Allah menolong hamba selama
hamba tersebut menolong saudaranya” (HR. Muslim).

²⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985),
h. 720.

Al-Qardh (memberikan hutang) merupakan kebajikan yang membawa kemudahan kepada muslim yang sedang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan. Bahkan dalam keadaan tertentu memberikan hutang bisa jadi hukumnya wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan.²⁵ Sedangkan, mengutang tidaklah terhitung sebagai meminta-minta yang makruh, karena Rasulullah saw sendiri pernah berhutang kepada orang lain.

2. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *Qardh* (Utang Piutang) ada tiga, yaitu :

7. Lafaz (Shighat), yaitu Ijab (pernyataan memberikan utang) dan Kabul (pernyataan menerima utang),
8. *Aqidain*, yaitu orang memberikan utang (Muqridh) dan orang yang berhutang (Mustaqridh),
9. Barang yang dihutangkan. Tiap-tiap barang yang dapat dihitung boleh dihutangkan. Begitu juga dengan mengutangkan hewan, maka dibayar dengan jenis hewan yang sama.²⁶

3. Larangan Dalam Utang Piutang

Melebihi bayaran dari sebanyak hutang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berhutang dan tidak berdasarkan perjanjian sebelumnya, maka hal itu diperbolehkan (Mubah). Bahkan hal ini merupakan kebaikan bagi orang yang membayar hutang. Rasulullah saw bersabda :

²⁵ Moh. Rifa'i. *op.cit.*, h. 415.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, h. 307.

فإن من خيركم أحسنكم قضاء

Artinya: “Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang paling sewaktu membayar hutang” (Muttafaq Alaihi).²⁷

Dalam hadis lain dinyatakan :

عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنا وقال خياركم أحاسنكم قضاء

Artinya : “Dari Abu Hurairah ia berkata : “Rasulullah telah berhutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya daripada hewan yang beliau utang itu, dan Rasulullah saw bersabda : “Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi dan mensahihkannya).²⁸

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang (Muqridh) atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka hal itu dilarang oleh syara'. Tidak halal bagi orang yang berpiutang untuk mengambil tambahan tersebut. Misalnya orang yang berpiutang berkata : “Saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian” dan lain sebagainya. Rasulullah saw bersabda :

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربوا

²⁷ Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shaheh Juz 2*, (Kairo : Matbah Salafiyah 1404 H), h. 142.

²⁸ Tirmidzi, *op.cit*, h. 583

Artinya : *“Tiap-tiap hutang yang memberikan manfaat, maka itu adalah salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk riba”*.²⁹

Dalam hadis lain yang diterima dari Anas Rasulullah saw bersabda :

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّائِبَةِ، فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Artinya : *“Seorang laki-laki di antara kami telah mengutangkan sesuatu barang kepada temannya, kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu, lalu ia ditanya dalam soal ini. Maka ia berkata : “Rasulullah saw telah bersabda : “Apabila salah seorang dari kamu mengutangkan sesuatu, kemudian diberi hadiah atau dinaikkan di atas kendaraannya, hendaklah jangan diterimanya hadiah tersebut, dan janganlah ia naik kendaraan tersebut kecuali jika memang antara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi utang piutang” (HR Ibnu Majah).*³⁰

Masih banyak hadis yang menguatkan hadis ini. Diriwayatkan juga bahwa Abdullah ibn Salam r.a berkata “Jika engkau mempunyai piutang atas seseorang, lalu ia memberimu jerami sebanyak satu bawaan unta, maka janganlah engkau menerimanya karena sesungguhnya itu adalah Riba”.

Maka pemberi utang (Muqrith) dilarang menerima hadiah dari pengutang, baik berupa benda maupun jasa, jika hal itu disebabkan karena

²⁹ Sulaiman Rasid, *op.cit.*, h. 308.

³⁰ *Ibid.* h. 309.

adanya hutang. Hal ini dikarenakan adanya larangan akan hal itu. Di samping itu juga disebabkan karena utang termasuk akad *Tabarru'* yang berlandaskan rasa kasih sayang dan belas kasihan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga jika disyaratkan adanya tambahan didalamnya, atau pemberi utang bermaksud atau berniat untuk mendapatkannya, maka hal itu sudah mengeluarkan *al-Qardh* dari tujuan semula, yaitu *Taqarrub Ilallah*.

Seorang muslim harus berhati-hati dan senantiasa memelihara keikhlasan dalam memberikan utang dan amal soleh lainnya. Karena sesungguhnya tujuan dari memberikan utang itu bukanlah untuk menambah harta secara lahir, akan tetapi menambah harta secara maknawi, yaitu dengan berkah yang diturunkan oleh Allah SWT, sehingga harta tersebut berkembang dan menjadi harta yang baik. Dan hal ini hanya bisa terwujud dengan keikhlasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dalam bentuk memberikan utang kepada orang yang membutuhkan.

Namun perlu digaris bawahi disini, bahwa tambahan yang haram di ambil dari pemberian utang (*al-Qardh*) adalah tambahan yang disyaratkan. Adapun pemberian yang berangkat dari keikhlasan orang yang berutang (*Mustaqridh*) yang bukan ditetapkan oleh pemberi utang, maka hal itu bukanlah sesuatu yang haram. Karena hal itu terhitung sebagai *Husnul Qadha* (membayar utang dengan baik) dan merupakan akhlak terpuji yang berangkat dari anjuran yang dapat dipahami dari hadis-hadis Rasulullah saw di atas.

4. Anjuran Segera Membayar Utang

Sebagian orang menyepelekan permasalahan utang. Hal ini merupakan perilaku tercela yang membuat banyak orang enggan untuk memberikan utang kepada orang lain, sehingga akibatnya orang-orang Islam beralih ke Bank yang menerapkan sistem Riba yang dilarang oleh Islam. Menyegerakan membayar utang merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditunda-tunda.³¹ Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda :

مطل الغنى ظلم

Artinya: “*Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang kaya (mampu membayar hutang) adalah sebuah kezaliman*”.³²

Akan tetapi, disisi lain Islam menganjurkan kepada orang yang memberikan piutang untuk memberikan kelapangan bagi orang yang berhutang untuk menanggukkan pembayaran hutangnya apabila ia tidak mampu untuk membayarnya.

³¹ Saleh al-Fauzan, *op.cit.*, h. 414.

³² Tirmidzi, *op.cit.*, h. 576.

BAB IV

PELAKSANAAN *PINJAM PAKAI* DI NAGARI TARUNG-TARUNG

A. Pelaksanaan *Pinjam Pakai* di Nagari Tarung-Tarung

Pinjam Pakai merupakan suatu istilah yang dikenal oleh masyarakat di Nagari Tarung-Tarung. Tidak tahu pasti sejak kapan praktek ini mulai dikenal oleh masyarakat. Sesebuah masyarakat *Nagai* Tarung-Tarung, Syaruddin, mengatakan bahwa praktek ini sudah dikenal sejak dia masih kanak-kanak. Akan tetapi, menurutnya, praktek ini bukanlah warisan adat istiadat dari nenek moyang dahulu, praktek ini hanyalah kebiasaan yang dikenal dimasyarakat dalam bertransaksi (bermuamalah) antara sesama masyarakat.¹

Istilah *pinjam pakai* sendiri dipergunakan untuk menghindari penggunaan istilah “gadai”. Karena disamping dirasa kurang sopan, penggunaan istilah gadai juga mempunyai beberapa konsekuensi bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dipergunakan oleh pihak yang memberikan jaminan. Di samping itu ada ketakutan dikalangan masyarakat bahwa gadai akan menimbulkan Riba.²

Ada dua model *pinjam pakai* yang berlaku ditengah masyarakat Nagari Tarung-Tarung pada saat ini. Model pertama adalah seseorang yang meminjam sejumlah uang dari orang lain harus menyerahkan tanah atau kolamnya atau sesuatu yang lain yang biasanya dipergunakan untuk mencari

¹ Syaruddin (Pemuka Masyarakat/Sesebuah), *Wawancara*, Nagari Tarung-tarung, 27 Agustus 2009.

² *Ibid.*

nafkah sebagai jaminan dan kemudian digarap oleh orang yang meminjamkan tersebut. Dalam kasus ini orang yang menggarap tanah tersebut bertindak sebagai penyewa karena dia harus menyerahkan sejumlah uang yang disepakati sebagai sewa tanah disamping uang yang ia pinjamkan. Model yang kedua adalah orang yang meminjam uang harus merelakan sawahnya digarap atau disewakan kepihak lain oleh orang yang meminjamkan uang tanpa adanya uang sewa kepada sipeminjam. Penggarapan sawah tersebut akan berlangsung selama uang yang dipinjam masih belum bisa dikembalikan oleh orang yang meminjam.

Pada mulanya masrarakat nagari Tarung-Tarung hanya melakukan praktek *pinjam pakai* menurut model yang pertama. Namun dengan perkembangan zaman dan di iringi dengan lajunya perkembangan penduduk dan mulainyan menyempit lahan pertanian, dan menipisnya rasa kekeluargaan yang selama ini terbina baik dikalangan masyarakat Nagari Tarung-Tarung, maka muncullah praktek *pinjam pakai* yang kedua pada awal tahun 1990³.

Untuk memahami lebih jelas bagaimana praktek *pinjam pakai* yang berlaku di Nagari Tarung-Tarung Penulis telah menyebarkan angket sebanyak masing-masing 50 angket kepada masing-masing masyarakat Suku *Mandailing* dan suku Mnangkabau serta mewawancarai beberapa di antara mereka untuk mempertajam dan memperdalam informasi dari mereka. Di samping itu, dikalangan masyarakat Suku Minangkabau, ada dua orang yang sering memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan

³. Zulpahmi (tokoh masyarakat), wawancara, Nagari Tarung-tarung 7 September 2009.

praktek *pinjam pakai*, yaitu bapak Akmal⁴ dan bapak Siar⁵. Dari dua orang ini diperoleh banyak informasi tentang pelaksanaan *Pinjam Pakai*.

Praktek *pinjam pakai* merupakan hal yang sudah lama dikenal ditengah masyarakat Nagari Tarung-Tarung, sehingga hampir seluruh masyarakat Nagari Tarung-Tarung mengetahui dan memahami apa yang disebut dengan transaksi *Pinjam Pakai*. Hal ini bisa dilihat pada data yang terdapat pada table dibawah ini :

Tabel IV
Pengetahuan Masyarakat Nagari Tarung-Tarung Tentang Transaksi
Pinjam Pakai

No	Alternatif Jawaban	Mandailing		Minangkabau	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Tahu	50	100 %	50	100 %
2.	Tidak Tahu	-	0 %	-	0 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Pada table di atas dapat diketahui bahwa semua responden mengaku bahwa mereka mengenal dan mengetahui bagaimana praktek transaksi *Pinjam Pakai* dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk transaksi ini bukanlah hal yang baru atau hal yang asing ditengah masyarakat Nagari Tarung-Tarung, melainkan suatu bentuk transaksi yang sudah dikenal luas

⁴. Akmal (Masyarakat Nagari Tarung-Tarung), *wawancara*, Nagari Tarung-Tarung, 15 September 2009

⁵. Siar (Masyarakat Nagari Tarung-Tarung), *wawancara*, Nagari Tarung—Tarung 17 September

dimasyarakat, baik itu golongan tua maupun golongan muda. Baik yang kaya yang biasanya bertindak sebagai orang yang memberikan pinjaman maupun orang miskin yang biasanya bertindak sebagai pihak peminjam.

Beberapa orang masyarakat justru mengakui bahwa mereka pernah melakukan transaksi tersebut, baik sebagai peminjam maupun sebagai pihak yang meminjamkan. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel V
Masyarakat Nagari Tarung-Tarung Yang Pernah Melakukan Transaksi
Pinjam Pakai

No	Alternatif Jawaban	Mandailing		Minangkabau	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Pernah	19	38 %	27	54 %
2.	Tidak Pernah	31	62 %	23	46 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Pada table di atas diketahui bahwa sebanyak 27 Orang dari responden yang berasal dari masyarakat Suku Minangkabau atau sekitar 54 % mengatakan bahwa mereka pernah melakukan transaksi *pinjam pakai* dan sebanyak 23 orang di antaranya atau sekitar 46 % mengaku tidak pernah melakukan transaksi *pinjam pakai*. Sementara ada sebanyak 19 Orang atau 38 % dari responden yang berasal dari Suku *Mandailing* yang mengaku bahwa mereka pernah melaksanakan transaksi *pinjam Pakai* dan 31 orang atau sekitar

62 % mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan praktek transaksi *pinjam pakai*.

Masing-masing masyarakat, baik yang pernah melakukan transaksi *pinjam pakai* maupun yang tidak pernah melakukan, mempunyai alasan masing-masing dari sikap yang mereka ambil tersebut. Untuk mengetahui alasan 46 orang responden (27 orang dari Suku Minangkabau dan 19 orang dari Suku Mandailing sesuai dengan data table di atas) yang pernah melakukan transaksi *pinjam pakai* dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel VI
Alasan Masyarakat Nagari Tarung-Tarung Yang Melakukan Transaksi
Pinjam Pakai

No	Alternatif Jawaban	Mandailing		Minangkabau	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kebutuhan	19	100 %	27	100 %
2.	Tertarik dengan Sistemnya	-	0 %	-	0 %
3.	Iseng	-	0 %	-	0 %
Jumlah		19	100 %	27	100 %

Dari table di atas dapat diketahui bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh pihak peminjam didasari atas dasar kebutuhan. Peminjaman tidak akan pernah terjadi kalau tidak dibutuhkan karena hal ini akan

melahirkan konsekuensi yang sesungguhnya tidak di inginkan oleh pihak peminjam.⁶

Hal ini tentunya berbeda bila dibandingkan dengan motivasi pihak yang meminjamkan uang. Menurut bapak Pangeran, mereka melakukan praktek *injam pakai* karena ingin membantu sesama.⁷

Sementara untuk mengetahui alasan 54 orang responden (31 orang dari Suku *Mandailing* dan 23 orang dari Suku *Minangkabau* sesuai dengan data table di atas) yang belum pernah melakukan transaksi *pinjam pakai* dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel VII
Alasan Masyarakat Nagari Tarung-Tarung Yang Tidak Melakukan
Transaksi *Pinjam Pakai*

No	Alternatif Jawaban	Mandailing		Minangkabau	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Tidak Ada Kebutuhan	17	55 %	14	60 %
2.	Takut Dililit Hutang	14	45 %	9	40 %
3.	Dll	-	0 %	-	0 %
Jumlah		31	100 %	23	100 %

Dari Tabel di atas dapat diketahui apa yang menghalangi masyarakat untuk melakukan transaksi *Pinjam Pakai*. Dari perbandingan dua Suku di atas

⁶. Ibu Jamilah (Pelaku *PinjamPakai*), *Wawancara*, Nagari Tarung-Tarung, 9 September 2009.

⁷. Pangeran (Pihak yang meminjamkan), *Wawancara*, Nagari Tarung-Tarung, 30 Agustus 2009.

dapat diketahui sebagian besar masyarakat tidak melakukan *pinjam pakai* karena tidak ada kebutuhan disamping karena ada juga ketakutan dililit hutang. Persentase jawaban takut dililit hutang lebih banyak dikemukakan oleh masyarakat Suku *Mandailing*.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa praktek *pinjam pakai* terjadi apabila seseorang ingin meminjam sejumlah uang dari orang lain, sebagai konsekuensinya, dia harus merelakan asset miliknya diserahkan kepada orang yang memberinya pinjaman. Hal ini dapat dipahami melalui data yang ada didalam table dibawah ini :

Tabel VIII

**Jawaban Responden Tentang Keharusan Menyerahkan Aset Apabila
Meminjam Sejumlah Uang**

No	Alternatif Jawaban	Mandailing		Minangkabau	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Harus Menyerahkan	50	100 %	50	100 %
2.	Tidak Harus Menyerahkan	-	0 %	-	0 %
3.	Sesuai Kesepakatan	-	0 %	-	0 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Dari table di atas dapat diketahui adanya keharusan untuk merelakan asset yang dimiliki untuk digarap dan dipergunakan oleh pihak yang memberikan piutang. Penyerahan asset ini hanya berlaku dalam praktek pinjam meminjam dengan menggunakan akad *Pinjam Pakai*, yaitu apabila

pinjamannya dalam jumlah yang besar. Sementara pinjam meminjam dalam jumlah yang kecil biasanya tidak dengan menyerahkan asset dan transaksi seperti ini biasanya tidak disebut dengan akad *Pinjam Pakai*, akan tetapi hanya disebut pinjam meminjam saja, seperti seseorang yang meminjam uang sejumlah Rp. 500.000,.

Asset yang diserahkan dalam transaksi *Pinjam Pakai* tersebut bisa berupa sawah, kolam ikan dan lain sebagainya. Asset tersebut merupakan sesuatu yang bisa digarap dan menghasilkan seperti sawah dan kolam ikan di atas, bahkan tidak jarang asset yang dijadikan sebagai jaminan dan digarap tersebut merupakan sumber pendapatan keluarga yang selama ini dijadikan andalan untuk menopang perekonomian keluarga. Hal ini dapat diketahui pada table dibawah ini :

Tabel IX

**Jawaban Responden Tentang Apakah Aset Yang Diserahkan Sumber
Hidup Keluarga**

No	Alternatif Jawaban	Mandailing		Minangkabau	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sumber Hidup satu-satunya	-	0 %	-	0 %
2.	Salah Satu Sumber Hidup	34	68 %	31	62 %
3.	Bukan Sumber Hidup	16	32 %	19	38 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Dari table di atas dapat diketahui bahwa sebesar 62 % Responden dari Suku Minangkabau dan 68 % Responden dari Suku *Mandailing* mengatakan bahwa asset yang dijadikan jaminan biasanya adalah sumber pendapatan yang dijadikan sebagai penopang perekonomian keluarga walaupun itu bukanlah satu-satunya sumber nafkah yang mereka miliki. Dengan kata lain bahwa sebagian besar orang yang meminjam sejumlah uang dengan transaksi pinjam pakai ini harus rela untuk sementara kehilangan sumber nafkah yang menghidupi keluarga.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara Penulis dengan beberapa orang responden. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Eri⁸. Menurutnya selama ini ia harus menggantungkan hidupnya dan keluarga pada sebidang sawah yang ia garap. Akan tetapi karena ia mengalami kesulitan keuangan untuk menghidupi keluarganya pada waktu itu maka ia meminjam sejumlah uang kepada ibu Epi⁹. Untuk itu ia harus merelakan sawahnya tersebut untuk digarap oleh ibu Epi sampai uang tersebut dikembalikan.

Warga masyarakat lain mengatakan bahwa kadang-kadang asset yang dijadikan jaminan bukanlah asset yang dijadikan sebagai sandaran hidup. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak M Nasir¹⁰, dia pernah meminjam sejumlah uang dengan sebuah kolam ikan sebagai jaminannya. Akan tetapi kolam yang ia jadikan jaminan bukanlah kolam yang selama ini menopang

⁸. Eri (Masyarakat Nagari Tarung-Tarung Suku Minang), *Wawancara*, Nagari Tarung-Tarung 28 Oktober 2008.

⁹. Epi (Masyarakat Nagari Tarung-Tarung Suku Miang), *Wawancara*, Nagari Tarung-Tarung 29 Oktober 2008.

¹⁰. M. Nasir (Masyarakat Nagari Tarung-Tarung Suku Minang), *Wawancara*, Nagari Tarung-Tarung 02 September 2009.

hidup keluarganya karena ia sendiri tidak punya waktu untuk mengelola kolam tersebut. Sehingga ia berpikir daripada kolamnya tidak terpakai lebih baik ia manfaatkan untuk dijadikan sebagai jaminan dari hutangnya.

Asset tersebut baru dikembalikan kepada pemiliknya apabila ia sudah bisa melunasi hutang-hutangnya. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel X
Waktu Pengembalian Aset Jaminan

No	Alternatif Jawaban	Mandailing		Minangkabau	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Setelah Hutang Dibayar	50	100 %	50	100 %
2.	Sebelum Hutang Dibayar	-	0 %	-	0 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Melalui table di atas dapat diketahui bahwa asset yang mungkin selama ini dijadikan sebagai sumber penghasilan baru dikembalikan setelah hutang-hutang dilunasi. Tidak ada responden yang mengatakan bahwa asset dikembalikan sebelum hutang dibayar lunas.

Hal ini juga berkaitan dengan perjanjian lamanya pinjaman. Biasanya lamanya pinjaman dikaitkan dengan panen asset yang dijadikan jaminan. Seperti satu kali panen ikan atau padi dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lamanya masa pinjaman dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel XI
Lama Masa Peminjaman

No	Alternatif Jawaban	Mandailing		Minangkabau	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	1 kali Panen Aset	41	82 %	43	86 %
2.	2 kali Panen Aset	8	16 %	7	14 %
3.	3 Kali Atau Lebih Panen Aset	1	2 %	-	0 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Dari table di atas dapat diketahui bahwa lamanya pinjaman dikaitkan dengan masa pemanfaatan lahan sawah atau kolam ikan yang dijadikan jaminan, seperti masa satu kali panen (mulai dari menggarap sampai panen) dan lain sebagainya. Dari table di atas juga dapat diketahui bahwa sebagian besar masa pinjaman itu adalah satu kali panen. Akan tetapi dalam beberapa kasus terdapat beberapa kejadian dimana pihak yang meminjam tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, seperti pihak peminjam tidak bisa membayar hutang setelah lewat masa satu kali panen. Maka dalam kasus seperti ini biasanya perjanjian bisa diperpanjang seperti dua kali panen dan seterusnya sampai orang yang berhutang mampu membayar hutangnya. Seperti yang terjadi pada kasus pak ketoh¹¹ yang

¹¹. Ketoh (Masyarakat Nagari Tarung-Tarung), *Wawancara*, Nagari tarung-Tarung 25 September 2009.

meminjam uang pak Siar¹² dan ibu Jamilah¹³ yang meminjam uang pak pikiran¹⁴. untuk membayar sewa selanjutnya. Apabila tidak ada kesepakatan untuk memperpanjang maka biasa pihak yang meminjamkan uang memberikan kelonggaran kepada pihak peminjam untuk membayar hutangnya tanpa menyewa tanahnya, akan tetapi tanah atau asset tersebut masih tetap dalam penguasaan pihak yang meminjamkan uang tanpa digarap sampai uang pinjaman tersebut dikembalikan.

Dari bentuk *pinjam pakai* di atas tidak ada kesepakatan bahwa dalam masa waktu yang ditentukan, apabila pihak peminjam tidak bisa melunasi hutangnya maka status kepemilikan asset akan berpindah dari peminjam kepada pihak yang meminjamkan. Hal ini bisa dilihat pada table dibawah ini :

Tabel XII

**Hak Kepemilikan Aset Apabila Hutang Tidak Bisa Dilunasi Dalam
Jangka Waktu Yang Ditentukan**

No	Alternatif Jawaban	Mandailing		Minangkabau	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Berpindah	-	0 %	-	0 %
2.	Tidak Berpindah	50	100 %	50	100 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

¹². *ibid*

¹³. *ibid*

¹⁴. *ibid*

Dari table di atas dapat diketahui bahwa transaksi *pinjam pakai*, baik yang dilakukan oleh masyarakat Suku *Mandailing* maupun yang dilakukan oleh Suku Minangkabau, tidak ada yang berujung dengan berpindahnya status kepemilikan asset apabila hutang tidak bisa dilunasi. Hal ini berbeda dengan transaksi gadai yang berujung dengan berpindahnya status kepemilikan apabila dalam waktu yang telah ditentukan hutang tidak bisa dibayar. Dengan dasar ini juga maka masyarakat tidak mau menamakan transaksi ini dengan gadai disamping menurut sebagian cerdik pandai dan alim ulama, transaksi gadai akan membawa kepada praktek riba apabila jaminannya dimanfaatkan oleh pihak yang memberikan piutang. Akan tetapi, sebagaimana telah diungkapkan di atas, konsekuensi dari ketidakmampuan membayar hutang tepat pada waktu yang telah ditentukan adalah perpanjangan masa penggarapan atau penguasaan asset oleh pihak yang memberikan pinjaman.

Permasalahan yang muncul berikutnya adalah apakah asset tersebut diserahkan dengan bayaran (ganti rugi/sewa) atau tidak. Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel XIII

Pemanfaatan Aset Jaminan Oleh Debitur

No	Alternatif Jawaban	Mandailing		Minangkabau	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Ya (Dengan Bayaran)	5	10 %	-	-
2.	Tidak	45	90%	50	100 %
Jumlah		50	100 %	50	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Suku Minangkabau dan *Mandailing* tidak mengeluarkan sewa atau bayaran terhadap sawah atau kolam ikan yang ia garap. Tanah atau kolam ikan tersebut digarap secara gratis sebagai imbalan terhadap sejumlah uang yang di pinjamkan. Dan sebagian kecil yang mengatakan bahwa mereka harus membayarkan sejumlah uang atas imbalan (sewa) dari sawah atau kolam ikan yang mereka garap. Masing-masing mereka mempunyai argumen dari apa yang mereka lakukan.

Masyarakat Suku Minangkabau dan Suku *Mandailing* yang tidak mengeluarkan sewa atau bayaran atas penggarapan asset yang jadi jaminan, beralasan bahwa penggarapan asset tanpa bayaran adalah salah satu bentuk terima kasih peminjam kepada pihak pemberi pinjaman karena telah rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk sementara waktu walaupun sebenarnya uang tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, akan tetapi karena dipinjamkan uang tersebut tidak bisa ia pergunakan. Di samping itu, apabila asset tidak dikuasai/digarap tanpa adanya bayaran, maka akan membuat pihak yang berhutang cenderung menunda untuk membayar hutangnya sehingga kadang-kadang menimbulkan perselisihan dibelakang hari.

Sementara kreditor yang mengeluarkan sewa atas aset (barang jaminan) mengemukakan alasan bahwa menggarap asset tanpa adanya bayaran bukanlah bentuk tolong menolong karena hal itu justru akan menghilangkan

sumber nafkah pihak peminjam untuk menghidupi keluarganya dan menyulitkan mereka untuk melunasi hutangnya. Adapun untuk menjamin terbayarnya hutang, maka penggarapan aset itu sudah cukup walaupun dengan konsekuensi adanya bayaran, sebab logikanya pihak peminjam pasti mengandalkan aset yang ia jadikan jaminan dan ingin agar aset tersebut kembali ia garap, sehingga dengan demikian ia akan berusaha secepat mungkin untuk membayar hutangnya.

Dalam hal pemanfaatan aset kreditor melakukan dua cara, *Pertama* dengan menggarap sendiri aset tersebut. *Kedua* dengan menyewakan kepada orang lain dan kreditor memperoleh hasil sewaan tersebut.

B. Perbandingan

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa dalam beberapa hal, bahkan sebagian besar aspek, terdapat kesamaan pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh suku *Mandailing* dan Suku Minangkabau. Yaitu adanya beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan, seperti adanya keharusan untuk menyerahkan aset, lamanya aset tersebut digarap oleh pihak yang meminjamkan uang. Dan beberapa hal yang telah dikemukakan di atas.

Dalam pelaksanaan *pinjam pakai* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Mandahiling sebagian kecil masih dijumpai sistem *pinjam pakai* model pertama, yaitu mempunyai ketentuan bahwa pihak yang meminjamkan uang yang menggarap aset yang dimiliki oleh pihak peminjam mempunyai keharusan untuk membayar sejumlah uang sebagai sewa dari aset yang ia

garap. Dengan demikian dalam hal ini di samping ia sebagai pihak yang berpiutang dia juga bertindak sebagai penyewa tanah milik pihak yang berhutang. Berbeda dengan *Pinjam Pakai* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Minangkabau dimana tidak ditemukan lagi ada keharusan pihak yang memberikan piutang, yang dalam hal ini juga bertindak menguasai dan menggarap asset pihak peminjam, untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai sewa dari barang atau asset yang ia manfaatkan.

Di samping itu, dalam hal apabila pihak peminjam tidak bisa membayar hutangnya tepat pada waktu yang ditentukan, dalam *pinjam pakai* yang dilakukan masyarakat Suku *Mandailing* biasanya dicari perjanjian baru, apakah dilanjutkan penyewaan asset sampai satu atau dua kali panen berikutnya, atau mungkin tidak dilanjutkan dengan catatan asset tetap dipegang oleh pihak yang memberikan pinjaman tanpa digarap. Sementara dalam praktek *pinjam pakai* yang dilakukan masyarakat Suku Minangkabau, apabila hutang tidak bisa dibayar maka secara otomatis penggarapan asset diperpanjang sampai hutang bisa dibayar.

C. Analisa

Dalam pemaparan tentang pelaksanaan transaksi *pinjam pakai* dikalangan masyarakat Suku Minangkabau di atas ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting, yaitu :

1. Adanya kesepakatan bahwa orang yang berhutang harus menyerahkan asset miliknya berupa sawah atau kolam ikan kepada orang yang memberi hutang untuk digarap atau dimanfaatkan,

2. Aset tersebut diserahkan tanpa adanya ganti atau sewa dari pihak yang berpiutang,
3. Aset tersebut diserahkan pada saat orang yang berhutang menerima pinjamannya, dengan kata lain kesepakatan itu sudah ada sebelum hutang dibayar oleh orang yang berhutang.
4. Aset tersebut tidak bisa dijual oleh kreditor atau berpindah hak milik dari debitor kepada kreditor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka manfaat yang diambil oleh orang yang berpiutang melalui sawah atau kolam ikan yang ia garap atau pergunakan termasuk salah satu bentuk Riba yang dilarang oleh agama. Hal ini sesuai dengan hadis yang dikemukakan di atas :

Setiap pinjaman/hutang yang (disyaratkan) mendatangkan manfaat maka itu adalah Riba.

Hadis ini merupakan Hadits yang oleh para ulama fiqih dipandang sebagai salah satu kaidah dalam Qawa'id Fiqhiyyah atau Dhawabith Fiqhiyyah.¹⁵

Dalam mengomentari hal ini Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni mengatakan bahwa termasuk manfaat yang dipandang Riba dalam hal ini adalah apabila disyaratkan orang yang berhutang menyewakan tanahnya dengan harga yang lebih murah dari harga sewa yang umum berlaku di tempat dan waktu itu.¹⁶ Bahkan Khatib Syarbini mengatakan bahwa apabila disyaratkan bahwa orang yang hutang terlebih dahulu memperbaiki barang

¹⁵ Abdullah Athiyah Ramadhan, hal. 200.

¹⁶ Ibnu Qudamah, al-Mughni Juz 4, hal. 211.

milik orang yang beriputang yang telah rusak, maka itu juga termasuk salah satu bentuk Riba.

Riba merupakan salah satu dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT.

Dalam

surat al-Baqarah ayat 275-278 Allah SWT berfirman :

[illegible]

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁷

¹⁷ Riba merupakan salah satu bentuk budaya yang sudah sangat mengakar di tengah masyarakat Arab pada waktu Al-Qur'an diturunkan. Oleh karena itu pengharaman Riba dilakukan bertahap sebanyak empat kali tahapan. Dan ayat ini merupakan ayat yang turun pada tahapan

Dalam salah satu haditsnya Rasulullah saw bersabda :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.

*Rasulullah saw mengutuk orang yang menelan harta riba, yang mengurusinya, yang menuliskannya dan yang menyaksikannya, karena sesungguhnya mereka itu semua sama” (HR. Muslim).*¹⁸

Sementara dikalangan masyarakat Suku *Mandailing* ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam pelaksanaan *pinjam pakai* yang mereka lakukan. Hal-hal tersebut adalah :

1. Adanya semacam kesepakatan bahwa orang yang meminjam uang harus menyerahkan asetnya untuk digarap atau dimanfaatkan oleh yang meminjamkan uang,
2. Konsekuensi dari pemanfaatan barang jaminan (asset) tersebut, sebagian masyarakat Suku *Mandailing* pihak yang meminjamkan uang atau yang memanfaatkan asset tersebut masih membayar sewa kepada pemilik asset tersebut,
3. Tidak ada pengurangan harga sewa dari harga yang berlaku, walaupun ada biasanya hanyalah keikhlasan dari pihak yang memiliki asset tersebut yang dibayarkan setelah asset tersebut dikembalikan.

Dari hal-hal di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh pihak yang memberikan

keempat atau terakhir. Lihat Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa’I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an Juz 1*, (Damaskus : Maktabah al-Ghazali, 1980), hal. 390-391.

¹⁸ Muslim, *Soheh Muslim Juz 4*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, th), h. 279. Al-Hafidh Masrap Suhaemi, *Terjemah Riyadush Shalihin*, (Surabaya : Mahkota, 1986), h. 772.

pinjaman dari piutang yang ia berikan dimana manfaat yang ia peroleh tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak peminjam, karena ia menggarap asset/jaminan dengan harga yang ia keluarkan (sewa).

Adapun mengambil manfaat dari benda yang digadaikan, maka tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jika mereka sepakat untuk menyewakannya dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Namun, jika tidak ada kesepakatan antar mereka, maka tidak boleh menggunakannya hingga selesai masa penggadaian. Kesepakatan ini diperlukan karena masing-masing pihak, baik penggadaai maupun penerima gadai, tidak boleh melakukan apapun terhadap benda yang digadaikan (al-Marhun) kecuali atas izin pihak lain. Karena jika salah satu pihak melakukan sesuatu terhadap benda yang digadaikan tanpa sepengetahuan pihak lain, berarti ia telah menghilangkan hak pihak lain tersebut.¹⁹

Di samping itu Khatib Syarbini dalam Kitabnya Mughni al-Muhtaj menjelaskan lebih rinci tentang persoalan Gadai. Menurutnya apabila seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan syarat dia bisa membeli atau menyewa barang yang dimiliki oleh si peminjam, maka hal itu dibolehkan.²⁰ Akan tetapi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah di atas, harga sewa atau harga pembelian itu tidak boleh disyaratkan harus lebih rendah dibandingkan harga yang berlaku.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi *pinjam pakai* model pertama (pemanfaatan barang jaminan oleh yang memberi

¹⁹ Fiqih Sehari-hari, h. 416.

²⁰ Mughni al-Muhtaj Juz 2, h. 166.

hutang) tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Dan model kedua (pemanfaatan barang jaminan oleh yang memberi hutang) yang dilakukan masyarakat Nagari Tarung-tarung bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Pinjam Pakai* adalah transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tarung-Tarung dengan menyerahkan sebarang asset kepada pihak yang memberikan pinjaman untuk dikelola/digarap atau di sewakan kepada pihak lain, seperti sawah atau kolam ikan untuk mendapatkan sejumlah pinjaman uang. Asset yang diserahkan tersebut akan dikembalikan setelah hutang/pinjaman tersebut dibayar,
2. Ada dua bentuk *Pinjam Pakai* yang berlaku ditengah masyarakat Nagari Tarung-Tarung. Model yang pertama adalah dimana pihak peminjam menyerahkan asetnya kepada pihak yang meminjamkan dan mendapatkan uang sewa dari asset yang diserahkan. Bentuk yang kedua adalah dimana asset diserahkan tanpa mendapatkan uang sewa,
3. Praktek *pinjam pakai* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tarung-Tarung adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam agama Islam. Tetapi ada sebagian kecil dari pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

B. Saran

1. Diharapkan kepada ulama dan Muballigh untuk lebih meningkatkan lagi pencerahan dan penjelasan tentang Islam, terutama yang berhubungan dengan muamalah atau transaksi yang berlaku dimasyarakat, karena persoalan muamalah dalam Islam lebih luas cakupannya dibandingkan ibadah, akan tetapi lebih sedikit disinggung,
2. Diharapkan kepada para akademisi dan sarjana hukum Islam agar bisa menggali lebih dalam tentang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan kehidupan muamalah mengingat perkembangan zaman yang semakin maju dan menuntut pemikiran tentang hukum Islam yang komprehensif dan selaras dengan kemajuan zaman, sebab Islam adalah syariat untuk semua zaman,
3. Diharapkan kepada masyarakat Nagari Tarung-Tarung dan masyarakat Islam pada umumnya untuk memandang Islam sebagai suatu konsep hidup yang *Kaffah*, tidak hanya ritual ibadah, tapi juga aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari.,
4. Diharapkan kepada Lembaga-Lembaga Keuangan Syari'ah untuk bisa lebih aktif memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang program-program ataupun transaksi yang Islami ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-, *Al-Jami' al-Shaheh Juz 2*, (Kairo : Matbah Salafiyah 1404 H)
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Daruqutni, Ali ibn Umar, *Sunan Daruqutni Juz 3*, (Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 2004)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan dan Penafsiran al-Qur'an, 1997), cet. Ke-9
- Dhahir, Siddiq M Amin, *al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruh fi al-Tathbiqah al-Mu'ashir* (terj), (Jakarta : Visi Insani, 2005)
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh : Maktabah al-Ma'arif, th)
- Ibnul Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Cairo : Dar el-Ma'arif, th)
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdillah ibn Ahmad, *Al-Mughni Juz 4*, (Riyadh : Dar Alam Kutub, th)
- Khatib Syarbini, Syamsuddin Muhammad ibn, *al-Mughni al-Muhtaj Juz 2*, (Beirut : Dar el-Ma'rifah, 1997)
- Malo, Manasse, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : LP FISIP UI, 1987), cet. Ke-6
- Moh. Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : Toha Putra, 1978)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), cet. Ke-4
- Nawawi, Abi Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf al-, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab Juz 12*, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, th)
- Ramadhan, Athiyyah Abdullah, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Iskandariyah : Dar el-Aiman, 2007)
- Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, (terj), (Jakarta : Gema Insani, 2006)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Qairo : Fath al-Islam al-Arabi, th)

Shabuni, Muhammad Ali al-, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an Juz 1*, (Damaskus : Maktabah al-Ghazali, 1980)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1973)

Tirmidzi, Abi Isa Muhammad ibn Isa al-, *Jami` Kabir Sunan Tirmidzi Juz 2*, (Beirut : Dar al-Gharbi al-Islami, 1998)

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985)

_____, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985)

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel I Jumlah Penduduk Nagari Tarung-Tarung	17
Tabel II Sarana Pendidikan Di Nagari Tarung-Tarung.....	18
Tabel III Jumlah Rumah Ibadah Di Nagari Tarung-taruung	20
Tabel IV Pengetahuan Masyarakat Nagari Tarung-Tarung Tentang Transaksi Pinjam Pakai.....	46
Tabel V Masyarakat Nagari Tarung-Tarung Yang Pernah Melakukan Transaksi pinjam pakai	47
Tabel VI Alasan Masyarakat Nagari Tarung-Tarung Melakukan Transaksi Pinjam Pakai.....	48
Tabel VII Alasan Masyarakat Nagari Tarung-Tarung Yang Tidak Melakukan Transaksi Pinjam Pakai	49
Tabel VIII Jawaban Responden Tentang Keharusan Menyerahkan Aset Apabila Meminjam Sejumlah Uang	50
Tabel IX Jawaban Responden Tentang Apakah Aset Yang di Serahkan Sumber Hidup Keluarga	51
Tabel X Waktu Pengembalian Aset Jaminan	53
Tabel XI Lama Masa Peminjaman	54
Tabel XII Hak Kepemilikan Aset Apabila Hutang Tidak Bisa dilunasi Dalam Jangka Waktu Yang di Tentukan....	55
Tabel XIII Pemamfaatan Aset Jaminan Oleh Debitur.....	56

Nama :	Umur :
Jenis Kelamin :	Pekerjaan :

- ❖ Angket ini dipergunakan untuk keperluan ilmiah
- ❖ Berilah tanda silang (X) pada salah satu guruf, a, b, c, atau d yang anda anggap benar
- ❖ Setelah diisi Angket Penelitian ini harap dikembalikan
- ❖ Kejujuran Bapak/Ibu/Sdr alam menjawab Angket ini merupakan keberhasilan kami dalam mengumpulkan data yang ada

1. Apakah Bapak/ibu/Sdr tahu/mengerti tentang praktek *Pinjam Pakai*?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah Bapak/ibu/sdr pernah melakukan praktek *Pinjam Pakai*?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
3. Jika jawaban no. 2 adalah Ya (pernah), apa motivasi Bapak/Ibu/Sdr melaksanakannya? ^{*}
 - a. Mendapatkan peluang menggarap tanah
 - b. Tolong Menolong
 - c. Ikatan Emosional
 - d.

ii

4. Apakah ada pihak keluarga Bapak/Ibu/Sdr yang pernah melakukan *Pinjam Pakai*?
- a. ada b. tidak ada c. tidak tahu
5. Apakah Bapak setuju jika keluarga Bapak/Ibu/Sdr melakukan *Pinjam Pakai*?
- a. setuju b. tidak setuju c. tidak tahu
6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah ada manfaat (nilai positif) yang dapat diambil dari pelaksanaan *Pinjam Pakai* tersebut?
- a. Ya b. Tidak c. Tidak Tahu
7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah praktek *Pinjam Pakai* tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama?
- a. Ya b. Tidak c. Tidak Tahu
8. jika jawaban no. 7 adalah ya, dari mana Bapak/Ibu/Sdr tahu tentang hal itu?
- a. dari ceramah ustadz(pengajian) b. dari buku agama (bacaan)
- c. dari acara TV/Radio d.
9. Apakah ada ustadz yang menyinggung tentang hukum *Pinjam Pakai* ini di daerah Bapak/Ibu/Sdr?
- a. ada b. tidak ada c. tidak tahu
10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah praktek *Pinjam Pakai* mempunyai dampak negatif?
- a. Ya b. Tidak c. Tidak Tahu

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Bapak/ibu/sdr tahu tentang praktek *Pinjam Pakai*? Dari mana Bapak/Ibu/Sdr tahu dan bagaimana pendapat Bapak tentang *Pinjam Pakai* itu sendiri?
2. Apakah Keluarga Bapak/ibu/sdr pernah melakukan *Pinjam Pakai*? Setujukah Bapak/Ibu/Sdr dengan hal tersebut?kemukakan alasannya
3. Apakah ada pengarahan/pengajian yang diberikan para ustadz tentang *Pinjam Pakai* ini di daerah Bapak/Ibu/Sdr? Jika ada apa kesimpulannya? Jika belum ada, perlukah pengajian itu dilakukan?apa alasannya?
4. Apakah Bapak/ibu/sdr pernah melakukan/ikut terlibat dalam pelaksanaan *Pinjam Pakai*? Apa Saja keterlibatan dan yang Bapak/Ibu/Sdr lakukan dalam praktek *Pinjam Pakai* tersebut? Apa motivasi Bapak/Ibu/Sdr melaksanakannya?
5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah ada manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan *Pinjam Pakai* tersebut? Apa saja keuntungannya dan dalam bidang apa saja?
6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah praktek *Pinjam Pakai* tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama?bisakah Bapak/Ibu/Sdr mengemukakan alasannya?
7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah praktek *Pinjam Pakai* akan menimbulkan efek negatif? Apa saja itu?

PEDOMAN OBSERVASI

Mengamati praktek *Pinjam Pakai* di Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, pengamatan terutama ditujukan kepada hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian, seperti tata cara pelaksanaan, siapa saja yang berperan dan terlibat, waktu pelaksanaan dan lain-lain.